

Analisis Kebijakan Pengiriman Anak-Anak Nakal ke Barak Militer oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kebijakan KDM di Jawa Barat)

Teuku Muhammad Arief¹, Margaretha Hanita²

¹Universitas Indonesia

²Universitas Pertahanan Republik Indonesia

E-mail: teukuarief606@gmail.com¹, margaretha.hanita@idu.ac.id²

Article History:

Received: 05 Agustus 2026

Revised: 20 Agustus 2026

Accepted: 26 Agustus 2026

Kata Kunci: *Child Protection, Military-Based Education, Narrative Policy Analysis, Public Policy, Youth Delinquency*

Abstract: *Meningkatnya kenakalan remaja di Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan kebijakan pengiriman anak-anak yang berperilaku menyimpang ke barak militer sebagai upaya pembinaan karakter dan disiplin. Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena dipandang memiliki manfaat sekaligus potensi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis narasi kebijakan, kontra narasi, dan metanarasi atas kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Narrative Policy Analysis (NPA) pada level analisis meso. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, berita media massa, dan literatur ilmiah. Data dianalisis melalui identifikasi elemen narasi, aktor kebijakan, sistem nilai, strategi, serta pembentukan metanarasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi utama pemerintah menempatkan kebijakan sebagai solusi pembentukan disiplin dan pengurangan kenakalan remaja, sedangkan kontra narasi menyoroti risiko pelanggaran hak anak, trauma psikologis, stigmatisasi, dan lemahnya dasar hukum serta bukti efektivitas jangka panjang. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kebijakan memerlukan pendekatan yang lebih humanis melalui pendidikan karakter, konseling, dukungan keluarga, intervensi psikososial, evaluasi berbasis bukti, serta kolaborasi lintas sektor agar tujuan pembinaan remaja dapat tercapai tanpa mengabaikan hak-hak anak.*

PENDAHULUAN

Tingginya kasus kenakalan remaja dan geng motor akhir-akhir ini membuat resah masyarakat luas dan menimbulkan banyaknya kekhawatiran para orangtua. Kemudian ditambah juga dengan fenomena tawuran pelajar, narkoba, juga perilaku merugikan sosial lainnya yang sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dan penyebabnya pemerintah daerah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat untuk mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer. Harapannya dengan pembinaan di barak militer, maka dapat memutus siklus kenakalan remaja tersebut (Airani, L, 2024)

Munculnya fenomena kenakalan remaja yang sangat mengkhawatirkan ini pun dikarenakan banyaknya orang tua merasa tidak sanggup lagi mendidik anak-anak mereka yang bermasalah, seperti suka tawuran, bolos sekolah, suka melawan orang tua, dan perilaku negatif lainnya. Para Guru dan sekolah formal pun sudah mengalami kesulitan dalam mengatasi perilaku para siswanya yang menyimpang (The Stance, 2025) Adapun kriteria anak nakal yang dibina di barak militer menurut Kang Dedi Mulyadi(KDM) sebagai Gubernur Jawa Barat yaitu anak-anak yang suka tawuran, suka mabuk-mabukan, suka main game dan lupa waktu seperti Mobile Legends, anak-anak yang tidak mendengarkan orang tua dan mengancam orangtuanya. Kemudian anak-anak nakal dan selalu membuat keributan di sekolahnya masing-masing dan suka tidak masuk sekolah, dimana dia sudah berangkat dari rumahnya ke sekolah, namun ke sekolah tidak hadir(bolos).

Menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, menjelaskan dari awal tahun 2025, terdapat ratusan anak yang terjerat perilaku kriminal. Terdiri dari 437 anak tercatat dengan kasusnya sebagai pencuri, menurut data yang dikumpulkan dari Aplikasi Manajemen Penyidikan Elektronik (EMP). Data ini diperoleh dari data yang dibaca di hari Kamis, 20 Februari 2025 pukul 15.00 WIB. Selain itu, data tambahan menunjukkan bahwa 460 anak telah dilaporkan terlibat dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan. Selain itu, 349 anak tercatat dengan kasus narkoba, dan tujuh anak tercatat karena berkelahi dengan siswa dan siswa. Kenakalan remaja adalah perilaku yang tidak sesuai dengan standar hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Kerentanan remaja terhadap kenakalan tersebut biasanya ada di usia antara 13 s.d 18 tahun (Pusat Studi Keamanan Nasional Polri, 2025).

Tujuan utama pemerintah, khususnya menurut KDM bahwa dalam pengiriman anak-anak nakal ke barak militer adalah untuk membina dan mendisiplinkan anak-anak tersebut melalui pendekatan yang dianggap mampu membentuk karakter dan mental yang tangguh. Dengan melibatkan TNI dan Polri, anak-anak diberikan pendidikan karakter, disiplin, serta pembinaan bela negara dalam lingkungan yang terstruktur dan penuh aturan, yang dianggap tidak mereka dapatkan di lingkungan keluarga ataupun sekolah (Tempo.co, 2025). Kemudian program ini juga dimaksudkan untuk memutus pengaruh lingkungan negatif seperti narkoba, kekerasan, dan geng motor dengan menempatkan anak-anak di lingkungan baru yang lebih positif dan terkontrol. Pendidikan militer ala barak dianggap dapat membentuk ketahanan mental, emosi, dan tanggung jawab anak-anak, sehingga mereka dapat menghadapi tekanan sosial dengan lebih baik. KDM menyatakan kebijakan ini dimulai di bulan Mei 2025 dan pesertanya merupakan anak-anak yang tertangkap perkelahian remaja ataupun terlibat dalam pelanggaran hukum lainnya. Pemerintah mengklaim bahwa pelaksanaan kebijakan ini akan dimonitor ketat agar tujuan program ini tercapai dengan baik, dan menurunkan angka kenakalan remaja di masa mendatang.

Kebijakan Gubernur Jawa Barat ini menjadi kontroversial, dikarenakan pendekatan militer ini menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait prinsip perlindungan anak dan efektivitas jangka panjangnya. Namun pada kenyataannya program ini pun mendapatkan banyak dukungan dari para kepala daerah seperti Depok, Cianjur, Purwakarta, dan Singkawang. Kemudian juga program inipun mendapatkan dukungan dari para orang tua yang anaknya bermasalah.

Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan landasan utama Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia (The Stance, 2025) Setiap anak memiliki hak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perilaku yang menjelekkan martabat manusia. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya melalui sistem peradilan anak yang menekankan keadilan restoratif, bukan pendekatan militer (Metrotvnews, 2024)

Kemudian para akademisi menilai kebijakan ini problematik karena tidak sesuai dengan pandangan pendidikan anak dan memiliki potensi berdampak negatif bagi perkembangan anak (Universitas Airlangga, 2024) Selain itu para Pakar hukum berpendapat bahwa tidak ada dasar

.....

hukum yang membenarkan mengirimkan anak nakal ke barak militer tanpa proses peradilan anak (Kompas.id, 2024). Kebijakan pengiriman anak-anak nakal ke barak militer oleh pemerintah daerah, khususnya di Jawa Barat, menimbulkan lebih banyak risiko daripada manfaat. Barak militer bukan lingkungan yang sesuai untuk tumbuh kembang anak. Risiko kekerasan fisik dan psikis, serta diskriminasi dan stigma sebagai “anak nakal”, sangat tinggi (Setiyawan, R, 2025). Anak-anak berpotensi mengalami trauma dan penguatan identitas negatif akibat pelabelan tersebut (Watirsnawatiwati, 2024).

Sementara itu, meskipun pendidikan anak nakal di barak militer memiliki potensi dalam pembentukan disiplin, namun pendekatannya sering bertentangan dengan prinsip ketahanan diri yang menekankan regulasi internal, dukungan empatik, dan pengembangan identitas mandiri. Dimana teori ketahanan diri (*resilience theory*) lebih menekankan kemampuan individu untuk beradaptasi, pulih, dan berkembang meski menghadapi tekanan atau lingkungan yang menantang. Teori ketahanan diri (*resilience theory*) dapat membantu anak nakal dalam pendidikan militer dengan membangun kemampuan mereka untuk beradaptasi, pulih dari tekanan, dan mengembangkan karakter positif di tengah lingkungan yang penuh tantangan. Pendidikan militer di barak yang terstruktur dapat melatih anak menjadi lebih tangguh secara mental dan emosional. Anak belajar menghadapi tekanan, mengelola stres, dan beradaptasi dengan aturan serta tuntutan disiplin yang tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip ketahanan diri, yakni kemampuan menghadapi dan bangkit dari situasi sulit (Johnson, B, 2020). Selain itu program Pendidikan anak nakal di barak militer akan menanamkan disiplin dan rasa tanggung jawab melalui rutinitas, aturan ketat, dan tugas-tugas yang jelas. Anak yang sebelumnya tidak terarah atau kurang pengawasan dapat mulai menata dirinya dan memahami pentingnya keteraturan serta tanggung jawab pribadi. Kemudian mereka akan mengembangkan strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer mungkin lahir dari keinginan membereskan masalah masalah anak remaja yang berperilaku menyimpang agar menjadi remaja yang baik, dan bermoral. Namun, kebijakan publik yang baik harus berpijak pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, efektivitas jangka panjang, serta pemahaman mendalam atas akar sosiologis permasalahan. Alih-alih memilih pendekatan militeristik, pemerintah daerah sebaiknya mendorong kebijakan intervensi sosial yang menyentuh akar permasalahan dari ketahanan keluarga, pendidikan, hingga pembangunan ruang aman bagi anak muda.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, timbulnya pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengiriman anak nakal ke barak militer yang dijalankan pemerintahan Jawa Barat ini, apakah dapat berjalan efektif, serta diterima masyarakat. Keefektifan narasi yang terkandung dalam kebijakan tersebut adalah hal yang sangatlah penting untuk menilai pelaksanaan kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer yang dikaji dengan metode *Narrative Policy Analysis* (NPA)

METODE

Metode yang dipergunakan adalah *Narrative Policy Analysis* (NPA) yang fokusnya pada narasi kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk pengiriman anak-anak nakal ke barak militer. Shanahan, Jones, dan McBeth (Shanahan, E.A., M.D. Jones, M.K. Mcbeth, 2017) menjelaskan NPA berasumsi bahwa kebijakan dibentuk melalui konstruksi sosial yang bersifat relatif dan narasi beroperasi pada tiga tahapan analisis: mikro (individu), meso (kelompok), juga makro (budaya serta kelembagaan). Narasi ini berperan penting dalam membentuk bagaimana masalah dipahami dan solusi kebijakan dipilih.

Shanahan, et.all (2017) menjelaskan bahwa peneliti harus menetapkan level analisis sebagai bagian dari penelitian. Terdapat tiga tingkat analisis, yaitu mikro, meso, dan makro. Pada

tingkat mikro, subjek penelitian adalah orang yang membuat narasi dan pihak yang dibentuknya. Pada tingkat meso, subjek penelitian adalah bagaimanakah peranan aktor kebijakan seperti pemerintahan dengan kelompok berkepentingan pada saat proses kebijakan publik. Pada tingkat makro, subjek penelitian adalah bagaimana ideologi, norma, dan budaya memengaruhi proses narasi kebijakan. Element dan konten narasi kebijakan adalah dua elemen penting yang dapat membantu peneliti menganalisis narasi kebijakan. Pengaturan (setting) narasi kebijakan meliputi ruang dan waktu; (2) karakter atau aktornya, terdiri dari protagonis, antagonis, juga korban; (3) pengelompokan perilaku yang mengaitkan setiap karakter; dan (4) Adanya kandungan moral yang merupakan solusi kebijakan. Konten narasi kebijakan meliputi tata sistem nilai yang dianggap sebagai tujuannya serta strategi (strategi). Dalam penelitian ini, level analisis adalah level meso, yang digunakan untuk mengkaji aktor kebijakan, yaitu pemerintahan Jawa Barat, bersama dengan sekelompok masyarakat yang menentang kebijakan itu. Data sekunder dipergunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narrative Policy Analysis

Narasi kebijakan mengenai mengirim remaja ke barak militer mungkin lahir dari keinginan menyelesaikan permasalahan kenakalan anak remaja yang berperilaku menyimpang agar menjadi remaja yang baik, dan bermoral. Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahwa kebijakan ini merupakan solusi tegas dan efektif untuk mengatasi kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan. Anak-anak yang dianggap sulit diatur, sering tawuran, dan terlibat perilaku negatif lain, perlu dibina dengan pendekatan disiplin ala militer yang terstruktur dan ketat. Pendekatan ini dianggap mampu membentuk karakter, mental, dan fisik yang tangguh serta memutus rantai perilaku menyimpang. Pendukung kebijakan juga menilai bahwa barak militer menyediakan lingkungan yang aman dan terkontrol, di mana energi anak-anak dapat disalurkan secara positif melalui latihan fisik dan pendidikan karakter.

Pemerintahan Jawa Barat bekerjasama dengan TNI AD dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut. Gubernur Jawa Barat KDM menyampaikan rencana mengirim anak bermasalah ke barak militer ketika menghadiri acara HUT ke-26 Kota Depok di Jln. Margondaraya di hari Jumat, 25 April 2025. Dia menuturkan kebijakan itu akan dilaksanakan awal bulan Mei 2025 dan menyatakan bahwa:

“Saya mau buat program, anak-anak yang nakal di rumahnya tidak mau sekolah, suka jajan terus, suka balapan motor, sama orang tuanya melawan diserahkan ke pemerintah Kota Depok untuk dibina di kompleks militer dan kompleks polisi. Setuju enggak?” dan akan menyediakan dana selama enam bulan ataupun sampai dengan satu tahun agar anak-anak yang dianggapnya akal dididik dan diarahkan TNI dan Polri. “Nanti udah baik baru dibalikin ke orang tuanya,” (Tempo.co., 2025)

Menurut pendapatnya bahwa rencana implementasi sudah dibahas dengan berbagai pihak terkait dan memperoleh dukungan masyarakat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Beliau pun menyampaikan:

“Jadi, saya akan merubah pendapat itu, tujuannya bagaimana solusi bagi orang tua yang tidak berani mendidik anaknya lagi. Begitupun terhitung lumayan para guru-guru yang menyerah tidak bisa mendidik siswa mereka. Di barak-barak TNI dan Polri, siswa tersebut tidak dibina untuk berperang; sebaliknya, mereka dididik untuk menjadi anak-anak yang sehat, menghindari konsumsi alkohol, merokok, excimer (narkoba), dan cium (minuman keras), yang merupakan obat-obatan yang tersebar luas. Siswa tidak akan pergi ke sekolah resmi, dan mereka akan dididik di barak selama enam bulan. TNI akan melakukan

penjemputan langsung para siswa ke rumahnya agar karakter dan perilakunya terbangun (The Stance, 2025). ”

Siswa yang tercatat dan bergaul dalam pergaulan bebas ataupun tindakan kriminal akan menjadi fokus utama kebijakan ini. Untuk program ini, telah disediakan sekitar tiga puluh hingga empat puluh barak khusus. Untuk membiayai program, pemerintahan provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat akan bekerja sama. Selain itu, Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa pembinaan tersebut diselenggarakan di dua tempat yaitu di Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi di Bandung dan Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta. Mengubah mentalitas anak-anak saat ini yang tidak kompetitif adalah tujuan dari kebijakan ini. Selain itu, dia menyatakan bahwa banyak orang tua dan pendidik tidak lagi mampu menghadapi siswa yang tidak berperilaku sesuai atau melanggar norma. (Tempo.co, 2025)

Anak-anak di barak militer diajarkan disiplin seperti membuat sarapan, mengelola kamar tidur, dan berolahraga tepat waktu. Mereka bahkan akan diajarkan untuk berpuasa dari Senin hingga Kamis, dan bagi mereka yang muslim, mereka akan diajarkan untuk mengaji ba'da magrib. Sebagaimana dinyatakan oleh gubernur Jawa Barat, bahwa:

“Tidak ada pendidikan militer, dan ini merupakan tujuan pembinaan yang tidak didapatkan di lingkungan kehidupan pribadi mereka dan di lingkungan keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka di barak militer bukanlah untuk latihan berperang.” (Tempo.co, 2025)

Kebijakan ini bertujuan untuk menangani anak-anak yang berperilaku menyimpang memang merupakan bagian penting dari perlindungan anak dan pembinaan generasi muda, meski terkesan tegas dan solutif ditengah maraknya kenakalan remaja. Namun masih perlu dianalisis secara kritis baik dari perspektif teoritis maupun hukum. Selain dikarenakan oleh faktor usia yang belum cukup untuk mendapatkan pendidikan kemiliteran yang bersifat tegas dan keras, kemudian anak-anak tersebut akan mendapatkan pelabelan sebagai anak nakal, seperti yang diungkapkan oleh Howard Becker. Anak-anak yang dijuluki "nakal" dan dikirim ke barak militer berpotensi mengalami penguatan identitas negatif akibat pelabelan tersebut (Risnawati, 2025)

Kemudian kebijakan program ini pun mendapatkan reaksi pro dan kontra. Para akademisi, psikolog, dan aktivis perlindungan anak mengkritik kebijakan ini sebagai problematik dan berpotensi merugikan. Penilaian mereka mengatakan bahwa barak militer bukanlah tempat yang sesuai untuk anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang. Pendekatan militer yang keras dan represif dianggap mengabaikan kebutuhan psikososial anak serta hak-hak dasar mereka. Kebijakan ini dikhawatirkan menimbulkan trauma, diskriminasi, dan stigma negatif yang justru memperburuk kondisi anak. Kemudian apabila sekolah tidak bisa membentuk siswa dengan karakter baik, maka tindakan yang tepatnya ialah dengan meningkatkan kualitas sekolah tersebut, tidak hanya penyerahan anak-anak nakal tersebut pada lembaga militer yang bertujuan berbeda jauh dari sekolahan (Setiawan, R, 2025).

Kebijakan mengirimkan anak nakal ke barak militer ini mengabaikan risiko trauma dan dampak psikologis karena fokus utama pada ketegasan dan disiplin, minimnya pemahaman tentang dampak psikologis, prioritas hasil jangka pendek, serta dominasi narasi pemerintah dan militer yang mengesampingkan suara ahli perlindungan anak. Padahal, bukti ilmiah menunjukkan bahwa trauma masa kecil dapat berdampak serius dan berkepanjangan pada kesehatan mental dan perkembangan anak. (IPB University. (2025)

Meskipun memperoleh berbagai kritikan dan adanya yang kontra tentang kebijakan ini. Kenyataannya tetap terlaksana di tengah kontroversi dan resistensi dari berbagai kalangan. Apabila dihubungkan dengan narasi kebijakan, bentuk narasi terhubung dengan kebijakan tentang mengirim remaja ke barak militer, bisa terlihat pada tabel di bawah ini..

Tabel 1. Komponen Narasi Kebijakan Tentang Mengirim Anak Nakal Ke Barak Militer

Bentuk Naratif	
Level Analisis	Makro: Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang mengirim anak nakal ke barak militer Meso: Pengaruh masyarakat/orang tua yang memiliki anak nakal dalam narasi kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer
Setting	Implementasi Kebijakan tentang mengirim remaja ke barak militer di Provinsi Jawa Barat selama pemerintahan Dedy Mulyadi
	• Protagonis (<i>Heroes</i>): Pemerintah Provinsi Jawa Barat, TNI, POLRI • Antagonis (<i>Villain</i>): Kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan ini (Sekolah, Keluarga, masyarakat, pakar pendidikan) • Korban(victim): anak-anak nakal dan orangtua yang memiliki anak-anak yang bermasalah/ berperilaku menyimpang
Plot	• FAQ: Pentingnya penanganan untuk menurunkan kasus kenakalan remaja dan geng motor yang akhir-akhir ini membuat resah masyarakat luas dan menimbulkan banyaknya kekhawatiran. • Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer • Pelibatan TNI dan POLRI untuk mendidik dan membina anak-anak nakal tersebut
Pesan Moral	Solusi atau nilai yang dapat diambil adalah diperlukannya Pendekatan holistik berbasis pendidikan karakter, konseling, dukungan keluarga, dan intervensi psikososial. Penanganan kenakalan remaja harus mengatasi akar masalah, bukan sekadar hukuman atau penyeragaman perilaku melalui disiplin militer
Sistem Nilai (<i>Belief System</i>)	• Kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer mendukung upaya untuk menurunkan kasus kenakalan remaja yang mengkhawatirkan • Kebijakan ini sebagai solusi tegas dan efektif untuk membentuk karakter dan disiplin anak
Strategi	• Sosialisasi kebijakan ini ke seluruh masyarakat Jawa Barat. • Sinergitas antar stakeholder

Sumber: Analisis Penulis

Kontra Narasi Kebijakan Mengirim anak nakal Ke Barak Militer

Kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer ini mendapatkan reaksi pro dan kontra. Meskipun anak anak yang dikirim ke camp militer ini mendapat berbagai fasilitas, seperti pendidikan sekolah, makan, minum dan tempat tidur yang nyaman. Namun, pendekatan militer ini justru condong pada teori kontrol sosial klasik yang menekankan pada penegakan disiplin keras demi menciptakan ketertiban. Ini mengabaikan kompleksitas penyebab kenakalan remaja, yang menurut teori labeling dari Howard Becker justru bisa memperparah stigma. Anak-anak yang dijuluki "nakal" dan dikirim ke barak militer berpotensi mengalami penguatan identitas negatif akibat pelabelan tersebut. (Watirisnawatiwati, 2024)

Kebijakan pengiriman anak nakal ke barak militer dibingkai dalam narasi ketegasan dan pembinaan karakter oleh pemerintah, namun bertentangan dengan narasi perlindungan anak dan pendidikan yang humanis dari kalangan akademisi dan psikolog. Narasi politik dan publik memperkuat kontroversi, dengan sebagian mendukung sebagai solusi cepat dan sebagian menolak sebagai represif dan berbahaya. Di ruang publik, kebijakan ini memicu perdebatan sengit. Sebagian masyarakat menyambutnya sebagai langkah berani dan solusi instan untuk masalah kenakalan remaja yang dianggap sudah tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Namun, banyak juga yang menilai kebijakan ini sebagai bentuk represi yang tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan hanya menekan gejala sementara tanpa memberikan solusi jangka panjang. Media menyoroti

risiko pelanggaran hak anak dan potensi kekerasan struktural yang terselubung dalam pendekatan militer ini. (Metrotvnews, 2024)

Selanjutnya, Edi Subkhan, Direktur Pusat Kajian Kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang (UNNES), sangat menentang program ini. Dia berpendapat bahwa kebijakan itu sangat mengkhawatirkan karena dapat menyebabkan segregasi di sekolah dan kepercayaan masyarakat mengenai pendidikan sekolah berkurang. Pada titik ini, masyarakat mungkin percaya bahwa sekolah dan guru tidak lagi memiliki cara untuk membina anak-anak nakal. Seyogyanya, terdapat banyak cara dalam ilmu pendidikan untuk pencegahan dan Pendidikan untuk anak-anak nakal, yang lebih memerlukan perhatian khusus dan ekstra dari guru. (CNN Indonesia, 2025)

Ditinjau dari bidang hukum, peraturan ini memberikan kekhawatiran. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiرو menegaskan bahwa TNI tidak bertanggungjawab mengenai pendidikan sipil. Solusi sederhana yang mengabaikan kompleksitas masalah adalah mengirim anak nakal ke barak militer. Kebijakan ini memiliki risiko memperpanjang siklus kekerasan dan meminimalkan hak anak, dan bukannya untuk pembentukan karakter. (Metrotvnews, 2024)

Analisis Metanarasi

Tujuan analisis metanarasi adalah untuk menghubungkan narasi utama yang dibangun oleh pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pengiriman anak nakal ke barak militer. Analisis metanarasi dilakukan untuk menentukan bagaimana narasi dapat membangun kebijakan publik dan untuk menganalisis narasi pada tingkat makro yang dimuat dalam kebijakan yang mengirim anak nakal ke barak militer. Shanahan, Jones, dan McBeth (2017) menyatakan bahwa peristiwa sejarah, perdebatan, dan orientasi budaya dapat digunakan untuk menemukan narasi tingkat makro. Dengan mempertimbangkan hal ini, berikut perbandingan antara dua set cerita yang telah dikumpulkan sebelumnya

Tabel 2. Perbandingan Antar Narasi

Narasi Utama	Kontra Narasi	Perbedaan
Kebijakan mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer merupakan usaha untuk menurunkan tingkat kenakalan remaja yang mengkhawatirkan	Kebijakan mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer tidak dapat menurunkan tingkat kenakan remaja yang mengkhawatirkan	Belief system yang berbeda, yang mana narasi dipenuhi oleh pandangan yang berbeda mengenai tujuan dan manfaat program yang disampaikan kedua belah pihak
Kebijakan mengirimkan anak-anak nakal barak militer untuk memutuskan siklus kenakalan remaja tersebut	Kebijakan mengirimkan anak-anak nakal barak militer tidak dapat memutuskan siklus kenakalan remaja tersebut	Belief system yang berbeda, yang mana narasi dipenuhi oleh pandangan yang berbeda mengenai tujuan dan manfaat program yang disampaikan kedua pihak
Pelibatan Militer (TNI dan POLRI) sebagai pelaksana pembinaan anak nakal di Barak untuk mendidik karakter, disiplin, serta pembinaan bela negara dalam lingkungan yang terstruktur.	Pelibatan Militer (TNI dan POLRI) sebagai pelaksana pembinaan anak nakal di Barak sebagai bentuk militerisasi pendidikan	Belum adanya peraturan khusus yang diketahui masyarakat bahwa dengan tegas TNI/ Polri untuk menyelenggarakan pendidikan anak-anak
Keberhasilan implementasi kebijakan mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer akan terus diperluas dan dilaksanakan di seluruh wilayah RI	Belum ada penelitian mengenai keberhasilan implementasi kebijakan mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.	Belum adanya kebijakan yang sama dan berhasil apakah benar-benar memiliki manfaat untuk masyarakat luas

Ada perbedaan antara narasi utama dan organisasi yang menentang kebijakan pengiriman anak-anak nakal ke barak militer. Metanarasi yang dihasilkan adalah istilah yang mengacu pada usaha untuk peningkatan efektifitas kebijakan dan penerimaan publik untuk pengiriman anak-anak nakal ke barak militer, sehingga tindakan strategis diperlukan agar program dapat bekerja dengan baik agar tujuan bersama tercapai. Biasanya munculnya sebuah kontra narasi selalu ada dalam kebijakan publik, sebagai respons dari orang-orang yang khawatir dan terdampak, ataupun dari mereka yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan tersebut.

Kontra narasi biasanya dapat digunakan sebagai bahan untuk memenuhi kekurangan yang ada saat ini. Adanya resistensi kebijakan publik, menunjukkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang kritis terhadap situasi ideal, tetapi konsekuensi negatif yang tidak dapat dihindari dan akan berkembang, kemudian rawan dimanfaatkan sekelompok kepentingan untuk merusak pemerintah. Pesan moral yang terkandung dalam situasi ini menghasilkan solusi kebijakan yang lebih baik dipromosikan melalui naskah kebijakan atau aturan untuk masyarakat umum tentang urgensi yang terbentuk ditunjukkan oleh analisis metanarasi mengenai manfaat dari kebijakan pengiriman anak nakal ke barak militer dan bertujuan untuk menghilangkan siklus remaja yang nakal.

Rekomendasi Strategi Penguatan Narasi Kebijakan Mengirim anak nakal Ke Barak Militer

Terdapat banyak pro dan kontra narasi, pada sisi lainnya, metanarasi juga telah mengembangkan pesan moral yang dapat digunakan sebagai solusi alternatif kebijakan yang didasarkan pada tata nilai dan strategi di bawah ini:

1. Perlunya kerjasama antar lembaga seperti pemerintah daerah bekerja sama erat dengan institusi militer (TNI) dan kepolisian (Polri) untuk penyelenggaraan program pembinaan. Seperti pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Resimen Armed Kostrad dan Rindam III/Siliwangi untuk pelaksanaan program. (Tempo.co., 2025)
2. Melakukan penyeleksian dan menentukan kriteria peserta yang jelas. Dalam hal ini menetapkan kriteria ketat bagi anak yang akan dikirim, seperti pelaku tawuran, bolos sekolah, melawan orang tua, dan perilaku negatif lain yang berulang kali dilakukan. Kriteria yang tepat bertujuan memastikan bahwa program ditujukan untuk anak yang benar-benar membutuhkan pembinaan disiplin. (Octania. R, 2025)
3. Pendidikan dan Pembinaan Terpadu. Anak-anak mengikuti rutinitas disiplin militer selama 6 bulan hingga satu tahun, termasuk pelatihan fisik, pendidikan karakter, dan pembinaan mental. Program juga mencakup pelajaran akademik agar peserta tetap terdaftar di sekolah asal dengan kelas khusus
4. Pengawasan Ketat dan Evaluasi Berkala. Program dipantau secara ketat untuk memastikan tujuan pendidikan dan pembinaan tercapai serta untuk menghindari pelanggaran hak anak. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampak program.
5. Pendekatan Humanis dan Pendidikan Karakter. Meskipun menggunakan pendekatan militer, program menekankan pembinaan berbasis kedisiplinan dan pendidikan karakter, bukan militerisasi perang atau hukuman fisik. Strategi ini perlu diimbangi dengan pendekatan holistik yang melibatkan konseling psikologis, dukungan keluarga, dan pendidikan karakter agar program tidak hanya menimbulkan efek jera sesaat, tetapi juga perubahan perilaku yang berkelanjutan dan perlindungan hak anak.
6. Penyediaan Anggaran dan Infrastruktur Memadai. Pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk pembinaan selama masa program, termasuk fasilitas barak, kebutuhan hidup, dan pendidikan peserta. Infrastruktur barak militer disiapkan dengan standar yang layak untuk mendukung proses pembinaan.

KESIMPULAN

Kebijakan mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer hakikatnya merupakan sebuah usaha untuk menurunkan tingkat kenakalan remaja yang mengkhawatirkan dan untuk memutuskan siklus kenakalan remaja tersebut. Tetapi dengan adanya perbedaan pendapat di masyarakat bahwa tujuan dan nilai mafaat program yang menjadi *belief system*, dan implementasi kebijakan tersebut diianggap belum menyentuh secara langsung esensi pendidikan berbasis humanis dan pendidikan berkarakter. Menurut teori ketahanan diri bahwa pendidikan anak nakal di barak militer yang terstruktur dapat melatih anak menjadi lebih tangguh secara mental dan emosional. Anak belajar menghadapi tekanan, mengelola stres, dan beradaptasi dengan aturan serta tuntutan disiplin yang tinggi.

Kebijakan ini menekankan bahwa pendekatan militeristik bukan solusi tepat untuk kenakalan remaja. Alih-alih membentuk karakter, kebijakan ini berisiko melanggar hak anak, memperparah trauma, dan mengabaikan akar masalah struktural. Solusi berkelanjutan harus mengedepankan prinsip perlindungan anak, pendidikan humanis, dan kolaborasi multidisiplin. Dalam mewujudkan tujuan kebijakan ini, maka diperlukan strategi, dan sosialisasi manfaat dari kebijakan ini, agar segera dapat menekan dan memutus siklus kenakalan remaja yang semakin memprihatinkan.

DAFTAR REFERENSI

- Alfafa, S. (2025, May 16). *Barak militer untuk anak bermasalah? Pakar hukum UNAIR ingatkan potensi pelanggaran hak anak*. Universitas Airlangga.
- CNN Indonesia. (2025, April 29). *Apakah tepat kirim siswa nakal ke barak militer*. CNN Indonesia.
- IPB University. (2025, May 29). *Mengapa anak “nakal” tak cukup hanya dikirim ke barak? Ini penjelasan psikolog IPB University atas kebijakan disiplin ala militer*.
- Johnson, B. R. (2020). *Positive youth development in the military teen resilience program* [Master’s thesis, Iowa State University].
- Listia, A. (2025, May 12). *Kirim anak nakal ke barak militer perlu dicoba, asal bukan otoriter*. Kompasiana.
- Media Indonesia. (2025, May 7). *Editorial: Setop kirim anak ke barak militer*. Metro TV News.
- Metro TV News. (2025, April 30). *Siap-siap siswa nakal bakal masuk barak militer*.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (2025, February 21). *Ratusan anak terlibat tindak kriminal sejak awal tahun 2025*.
- Redaksi The Stance. (2025, May 2). *Rencana mengirim siswa nakal ke barak militer: Kebijakan keliru dan berbahaya*. The Stance.
- Risnawati, W. (2025, May 8). *Kebijakan Pak Dedy Mulyadi dalam penanganan anak nakal dikirim ke cmap barak militer*. Kompasiana.
- Sahal, U. (2025, May 10). *Soal anak nakal dikirim ke barak militer, akademisi UM Surabaya: Kebijakan problematik*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Saputra, E. Y., Fajri, D. A., Trikarinaputri, E., & Antara, A. (2025, May 3). *Dedi Mulyadi kirim anak nakal ke barak, ini tempat dan materi programnya*. Tempo.
- Yunus, S. (2025, May 6). *Alasan kepala daerah kirim anak nakal ke barak militer*. Tempo.